

KONTRIBUSI PERSATUAN MAHASISWA ISLAM PATANI (SELATAN THAILAND) DI INDONESIA (PMIPTI) WILAYAH SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2022 DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PATANI THAILAND SELATAN

CONTRIBUTION OF THE PATANI (SOUTH THAILAND) ISLAMIC STUDENT UNION IN INDONESIA (PMIPTI) WEST SUMATERA REGION 2017-2022 IN CONFLICT SETTLEMENT IN PATANI SOUTH THAILAND

Khoiree Yako¹, Dewi Dahlan²

UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: khoiree501@gmail.com
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: dewidahlan@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang “Kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam Penyelesaian Konflik di Patani Thailand Selatan”. Sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya konflik yang terjadi di Patani dan bagaimana kontribusi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam penyelesaian konflik di Patani. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi munculnya konflik yang terjadi di Patani dan untuk mengetahui kontribusi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam Penyelesaian Konflik di Patani. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Patani, yaitu berawal dari perebutan wilayah dan kekuasaan antara Inggris dan Thailand yang bersaing untuk menguasai Semenanjung Melayu. Pada akhirnya Kerajaan Siam Thailand yang dapat menaklukkan Kerajaan Melayu Patani. Sejak Melayu Patani berada di bawah naungan Kerajaan Siam Thailand, rakyat Patani mengalami banyak diskriminasi di antaranya munculnya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Kerajaan Thailand terhadap warga Patani yang mengancam identitas masyarakat Patani itu sendiri. Kontribusi yang dilakukan PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terhadap penyelesaian konflik di Patani, yaitu dengan cara memberitahukan kepada dunia luar terutama tokoh-tokoh masyarakat dan aparat-aparat pemerintah di Negara Indonesia terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat Patani dewasa ini dengan melakukan berbagai kegiatan serta membuka ruang politik untuk menyampaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand.

Kata kunci: Kontribusi, PMIPTI, Konflik, Patani.

Abstract

This journal discusses "The Contribution of the Patani (Southern Thailand) Islamic Student Union in Indonesia (PMIPTI) West Sumatra Region 2017-2022 in Conflict Resolution in Patani Southern Thailand". The sub-focus of the research in this thesis is what is behind the emergence of the conflict that occurred in Patani and how the contribution of PMIPTI for the West Sumatra Region in 2017-2022 in conflict resolution in Patani. The purpose of this study is to find out what is behind the emergence of conflicts that occurred in Patani and to determine the contribution of PMIPTI for the West Sumatra Region in 2017-2022 in

Conflict Resolution in Patani. The type of research that the author uses in this study is a qualitative research with a descriptive approach. Sources of data used in this study consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the author's research can be revealed that the background of the conflict in Patani, which started from the struggle for territory and power between Britain and Thailand who competed for control of the Malay Peninsula. In the end, the Thai Kingdom of Siam was able to conquer the Patani Malay Kingdom. Since the Patani Malays were under the auspices of the Thai Siamese Kingdom, the Patani people experienced a lot of discrimination, including the emergence of regulations imposed by the Thai Kingdom against the Patani people which threatened the identity of the Patani community itself. The contribution made by PMIPTI for the West Sumatra Region towards conflict resolution in Patani is by informing the outside world, especially community leaders and government officials in Indonesia regarding the problems faced by the Patani community today by carrying out various activities and opening up political space. to convey the problems of the conflict that occurred in Patani, Southern Thailand.

Keywords: Contribution, PMIPTI, Conflict, Patani.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam Penyelesaian Konflik di Patani Thailand Selatan. Pada penelitian ini penulis akan menjabarkan mengenai permasalahan mengenai apa yang melatarbelakangi munculnya konflik yang terjadi di Patani, Thailand Selatan dan bagaimana kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Tahun 2017-2022 Wilayah Sumatera Barat dalam penyelesaian konflik di Patani Thailand Selatan. Penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama, yaitu skripsi dari Naslan Wadeng dengan judul “Konflik Sosial Pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan”.

Fokus kajian dalam penelitian ini sama dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan latar belakang terjadinya konflik sosial pada masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas latar belakang terjadinya konflik sosial pada masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan dan letak perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada bagaimana kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani Thailand di Indonesia (PMIPTI) Wilayah Sumatera Barat tahun 2017-2022 terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Patani Selatan Thailand.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito & Seltiawan, 2018). Metode kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling* di mana penentuan sampel yang pada awalnya berjumlah kecil yang kemudian membesar, seperti bola salju yang bergelinding yang semakin lama semakin membesar (Sumarwan dkk, 2014). Pada awalnya penulis memilih satu orang responden/informan, yaitu Rusdee Japakiya untuk mencari data terkait penelitian yang penulis teliti, akan tetapi data yang diperoleh dari Rusdee Japakiya masi kurang dan kemudian penulis menambah beberapa pengurus PMIPTI Wilayah Sumatera Barat yang penulis pandang dapat memberikan kelengkapan data untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG MUNCULNYA KONFLIK DI PATANI SELATAN THAILAND

Provinsi Patani mempunyai sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama dari negeri-negeri di Semenanjung Melayu, seperti Malaka, Johor dan Selangor. Sejarah Patani merujuk kepada Kerajaan Melayu Tua pengaruh Hindu-India yang bernama Langkasuka. Langkasuka itu terletak di daerah Patani, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli antropologi di Prince of Songkla University dan dikuatkan juga oleh sejarawan Prof. Zainal Abidin Wahid, Prof. Hall, Prof Wheatly dan Mubin Shepard. Persoalan berubahnya nama Langkasuka menjadi Patani masih belum diketahui dengan pasti karena tidak ada catatan sejarah yang

jelas mengenai hal itu. Mengikut hikayat Patani, Kerajaan Patani berasal dari Kerajaan Melayu yang berpusat di pedalaman dan sulit untuk didatangi oleh pedagang-pedagang, sehingga raja Patani memindahkan pusat kerajaan ke sebuah perkampungan nelayan yang diberi nama Patani (Wayeekao, 2016).

Sejarah konflik di Patani terjadi pada masa kolonialisme yang berawal dari perebutan wilayah dan kekuasaan antara Inggris dan Thai. Mereka bersaing untuk menguasai Semenanjung Melayu. Pada tahun 1832 M Thai menakukkan Patani berdasarkan Undang-Undang *Thelsaphiban* 1902 dan Traktrat Anglo-Siam 1909, Thai harus melepaskan klaim kekuasaannya atas empat negara bagian Malaya yang pada waktu itu dimasukkan dalam Malaya-Inggris. Sebagai gantinya, Thai mendapatkan pengakuan secara diam-diam atas kekuasaannya terhadap wilayah dan orang-orang Malaya di sebelah Selatan (Patani, Yala, Narathiwat dan Satun). Pada tahun 1906 pemerintah Thai menerapkan sistem yang dikenal dengan *boriwen cit hula mulang* (wilayah sentral). Dalam sistem tersebut dijadikan tujuh negeri kecil dalam satu negeri, yaitu Monton Patani (Kota Besar Patani). Kemudian dibagi lagi menjadi empat negeri, yaitu Patani, Yala, Narathiwat dan Saiburi di mana setiap negeri dipimpin oleh seorang gubernur (Sulong & Machali, 2016).

Pada akhir abad XVII Kerajaan Patani mengalami krisis politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan disabilitas ekonomi politik. Dalam kondisi tersebut Kerajaan Siam mendapat kesempatan besar untuk menyerang, menguasai dan mengambil alih kekuasaan Patani yang terjadi pada tahun 1785. Penguasaan Kerajaan Siam terhadap Patani inilah yang menjadi akar perpecahan dan konflik yang berkepanjangan di Thailand sampai saat ini (Sulong & Machali, 2016).

Gejolak Kerajaan Siam dan Patani dari waktu ke waktu semakin besar. Seiring dengan proses pergantian sistem di Kerajaan Siam yang pada akhirnya dapat menaklukkan Kerajaan Melayu Patani. Sejak Melayu Patani berada di bawah naungan Kerajaan Siam, rakyat Patani mengalami banyak diskriminasi (Hifza & Aslan, 2019). Diskriminasi penguasa Thailand semakin terlihat setelah munculnya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Kerajaan Thailand terhadap warga

Patani yang mengancam identitas masyarakat Patani itu sendiri. Wilayah, bahasa dan budaya mereka telah diubah secara sepihak oleh Kerajaan Thailand. Wilayah Patani dibagi menjadi tujuh bagian, bahasa Melayu yang biasa mereka gunakan diganti dengan bahasa nasional Thailand dan budaya yang berlaku di Patani yang sangat kental dengan budaya Melayu juga harus diganti mengikuti budaya Thailand. Isu-isu identitas ini yang kemudian membuat orang-orang Patani merasa terancam sehingga mereka mengeskalasi konflik dengan melakukan pemberontakan dan menuntut kemerdekaan (Alexandra, 2017) yang berujung munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat (Wayelelkao, 2016).

Kaum minoritas muslim Melayu Patani di bawah kekuasaan pemerintah Thailand diasimilasi secara paksa melalui berbagai kebijakan-kebijakan negara (*state policy*) yang dibentuk oleh pemerintah yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kondisi ini semakin buruk dengan adanya keputusan pemerintah Thailand dalam menciptakan negara modern dengan ideologi buddhaisme dan militerisme. Elit politik dan sektor publik didominasi oleh etnis Thai baik ditingkat nasional maupun lokal dalam hirarki kekuasaan negara. Dari penetapan kebijakan secara paksa tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya aksi penentangan (unjuk rasa) dari kaum minoritas muslim Patani, seperti tujuh tuntutan Kiyai Hj. Sulong (otoritas wilayah otonomi), Tenggu Mahmood Mahyeedeen (otoritas negara federal tanah melayu) yang mana aksi unjuk rasa tersebut dibalas dengan tindakan kekerasan yang tidak berpriskemanusiaan oleh pemerintah Thailand dengan membunuh Kiyai Hj. Sulong dan Tenggu Mahmood Mahyeedeen secara kejam. Setelah itu muncul gerakan kemerdekaan yang dibentuk oleh Hj. Ustaz Amin Tokmina (menuntut otoritas kemerdekaan Patani) yang pada akhirnya mengakibatkan pertumpahan darah antara aparat pemerintah (komunitas Thai) dengan warga sipil komunitas muslim Patani (Mamah, 2018).

Pada tahun 1960 memuncaknya gerakan separatis dikarenakan adanya diskriminasi kepada penduduk Patani yang mayoritas Melayu muslim yang dilarang menggunakan bahasa Melayu, larangan mengajar agama Islam di

sekolah-sekolah dan tindakan represif aparat negara terhadap protes masyarakat Melayu muslim, seperti pelanggaran hak asasi, pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan paksa yang tidak kunjung usai (Wadeng, 2018).

Munculnya gerakan perlawanan dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut diberhentikannya sikap deskriminasi kerajaan Thai. Identitas lama masi berada dalam banyangan Kerajaan Patani mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebab munculnya gerakan ini karena Patani dianggap sebagai minoritas dan daerah taklukkan Kerajaan Siam, maka dari itu masyarakat Patani berusaha mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Patani (Wulandari, 2018).

Faktor-faktor penyebab munculnya gerakan separatis di Thailand Selatan, yaitu faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak terbentuknya sistem administrasi provinsi dan terpusat dengan diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler yang menyebabkan adanya penyatuan simbol-simbol kultural dengan diberlakukannya sistem pendidikan sekuler. Pemeritah pusat mewajibkan bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggunakan bahasa Thai dan pelarangan bahasa Melayu. Faktor inilah yang menjadi dasar pemisahan diri kaum Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Secara politik, yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan hak otonomi dalam berbagai bidang baik dalam bidang agama, kebudayaan, hukum dan membentuk pemerintahan yang otonom dengan adanya dominasi elit politik di pemerintahan publik dan pegawai yang berasal dari pusat mendiskriminasikan penduduk Patani yang mayoritas Melayu Muslim. Secara ekonomi, ada tiga wilayah di Thailand Selatan (Yala, Narathiwat dan Patani) yang merupakan provinsi termiskin di Thailand dengan 46% populasi berada di bawah garis kemiskinan (Wulandari, 2018).

Konflik Patani mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2004 dengan adanya penyerbuan markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat

tentara Thailand dan hilangnya 400 senapan lengkap beserta amunisinya yang diikuti dengan ratusan militan melakukan serangan teroris terhadap 10 pos polisi diseluruh Provinsi Yala, Narathiwat, Songkhla dan Patani di Thailand Selatan. Setelah 7 jam penyerangan sebanyak 32 militan Thailand mundur dengan memasuki Masjid Kru-Sel yang mana Masjid tersebut dianggap sebagai Masjid tersuci di Patani. Pergerakan ini dianggap sebagai titik kelemahan militan muslim sehingga Jendral Paloop Pinmanee memerintahkan untuk menyerang Masjid yang di tempati sebagai persembunyian militan tersebut. Penyerangan terhadap rumah ibadah ini mengakibatkan intensitas konflik. Saat terjadinya peningkatan konflik pemerintah Thailand mulai menyadari bahwa konflik Patani dapat meluas ke gerakan separatis dan terancamnya asas Thailand Lak Thai (Raja, Thai, Budha). Setelah terjadinya insiden Arion, Krule Se dan Tak Bai pemerintah Thailand mulai fokus dalam mengatasi pemberontakan dan mengubah isu pemberontakan tersebut menjadi isu politik (Wulandari, 2018).

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik di Patani, yaitu berawal dari perebutan wilayah dan kekuasaan antara Inggris dan Thailand yang bersaing untuk menguasai Semenanjung Melayu. Pada akhirnya Kerajaan Siam Thailand yang dapat menaklukkan Kerajaan Melayu Patani. Sejak Melayu Patani berada di bawah naungan Kerajaan Siam Thailand, rakyat Patani mengalami banyak diskriminasi di antaranya munculnya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Kerajaan Thailand terhadap warga Patani yang mengancam identitas masyarakat Patani itu sendiri. Wilayah, bahasa dan budaya mereka telah diubah secara sepihak oleh Kerajaan Thailand. Wilayah Patani dibagi menjadi tujuh bagian, bahasa Melayu yang biasa mereka gunakan diganti dengan bahasa nasional Thailand dan budaya yang berlaku di Patani yang sangat kental dengan budaya Melayu juga harus diganti mengikuti budaya Thailand.

KONTRIBUSI PERSATUAN MAHASISWA ISLAM PATANI (SELATAN THAILAND) DI INDONESIA (PMIPTI) WILAYAH SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2022 DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PATANI THAILAND SELATAN

PMIPTI adalah sebuah organisasi mahasiswa Patani (Selatan Thailand) yang ada di Indonesia, organisasi ini didirikan untuk menyatukan mahasiswa Patani yang menuntut ilmu ke Indonesia (Nofra dan Kharisma, 2020). PMIPTI juga merupakan organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga para anggota mampu mengabdikan diri kepada masyarakat dan pengembangan potensi anggota baik dalam aspek intelektual upaya meningkatkan kualitas, loyalitas dan moralitas (Hayiteh, 2021). Organisasi ini sudah memiliki beberapa cabang diseluruh Indonesia salah satunya berada di Kota Padang, Sumatera Barat (Nofra & Kharisma, 2020). Organisasi PMIPTI memiliki manfaat selain sebagai wadah pemersatu seluruh mahasiswa Patani yang berkuliah di Indonesia, organisasi PMIPTI juga berperan penting dalam memberikan informasi terkait konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand.

Pada tanggal 22 September 1972 organisasi PMIPTI terbentuk karena adanya pertemuan yang dilakukan antara perantauan muslim Thailand di Indonesia dengan tujuan untuk menyatukan mahasiswa Patani yang menuntut ilmu di Indonesia untuk tetap bisa mempertahankan budayanya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi muslim Thailand dari Jakarta, Yogyakarta dan Bandung yang dilaksanakan di Balai Gading Asrama Putri Aceh Cut Nyak Dhien Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa Patani semakin banyak yang menuntut ilmu di Indonesia sehingga organisasi PMIPTI semakin berkembang dan memiliki banyak cabang diberbagai daerah Indonesia salah satunya berada di Kota Padang, Sumatera Barat (Japakiya, wawancara, 16 Mei 2022).

PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terbentuk pada tanggal 2 Oktober 2014 yang terdiri dari 6 orang anggota, di antaranya terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan (Japakiya, wawancara, 16 Mei 2022). Mulanya organisasi PMIPTI Padang ini bernama Ikatan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (IMMPI) yang kemudian pada tahun 2015 berganti nama menjadi PMIPTI dengan

tujuan mencakup kekuatan yang lebih umum dan banyak (Nofra dan Kharisma, 2020:131). Berdirinya organisasi PMIPTI Padang dengan tujuan mencari ilmu dan pengalaman untuk mencapai visi dan misi organisasi, yaitu kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang merupakan wadah peningkatan pembinaan sosial, kemasyarakatan yang berjuang atas dasar kegiatan kemahasiswaan (Japakiya, wawancara, 16 Mei 2022).

Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI), mempunyai lambang sang merah putih berbulan bintang bertulis PMIPTI. Gambar lambang sebagai berikut:



Pengertian Lambang PMIPTI:

1. Bentuk tegak lurus yang melambangkan pendirian yang teguh dalam menetapkan masa depannya dengan penuh optimisme.
2. Perisai bersudut lima di atas menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Islami dan bersudut tiga di bawah berbentuk kalam melambangkan kemahasiswaan dan profesionalisme.
3. Tulisan PMIPTI besar di atas melambangkan bahwa PMIPTI berada pada front terdepan dalam membangun masyarakat Patani.
4. Sang Saka Merah Putih berbulan bintang melambangkan semangat pengorbanan dan keikhlasan dalam membangun panji-panji Islam di masyarakat Patani.
5. Terdapat garis melintang antara tulisan PMIPTI dengan Sang Saka Merah Putih berbulan bintang melambangkan bahwa PMIPTI bersifat

independen, sedangkan garis lingkaran melambangkan pernyataan antara PMIPTI dengan aspirasi masyarakat Patani.

6. Tulisan di luar lingkaran perisai bagian bawah melambangkan tempat kedudukan PMIPTI.

Pengertian Warna Lambang PMIPTI:

1. Warna hijau melambangkan bangsa melayu yang Islami dan bumi Patani yang subur dan makmur.
2. Warna merah melambangkan berani karena benar.
3. Warna Putih melambangkan kejujuran dan keikhlasan yang berlandaskan ketakwaan.
4. Warna kuning melambangkan optimism terhadap nilai-nilai luhur kemelayuan (Staf Pengurus PMIPTI (SPP), 2018-2019:4).

Program umum PMIPTI berasaskan Islam dan keimanan yang berdasarkan AD/ART PMIPTI. Arah dan kebijakan program umum PMIPTI, yaitu 1) Program umum PMIPTI mengupayakan anggota PMIPTI memiliki potensi efektif yang bertanggung jawab, cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa, demokratis dan memiliki keterampilan serta pandangan yang rasional sesuai dengan intelektualitas. 2) Program umum PMIPTI sebagai program konstruksi dan pengembangan anggota PMIPTI dalam upaya mempersiapkan anggota PMIPTI untuk mengembangkan diri dan organisasi dalam menghadapi dunia global dan khususnya masyarakat Patani.

Program umum PMIPTI, pengertiannya, yaitu 1) Program umum PMIPTI adalah program operasional Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia pada hakikatnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi PMIPTI dalam bentuk aktivitas transparansi untuk mewujudkan misi kemahasiswaan, misi kemasyarakatan dan tujuan organisasi. 2) Program umum PMIPTI adalah rangkaian rencana dan kegiatan organisasi yang merupakan penjabaran dari AD/ART PMIPTI yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 1 (satu) periode dan merupakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang melibatkan seluruh anggota PMIPTI. 3) Program umum PMIPTI merupakan

program pengkaderan anggota PMIPTI dalam rangka melahirkan cendekiawan muslim yang mempunyai tanggung jawab terhadap umat Islam umumnya dan khususnya umat Islam di Patani. 4) Program umum PMIPTI merupakan garapan PMIPTI dalam periode bersangkutan.

Maksud pokok-pokok program umum PMIPTI disusun untuk membina, mempersiapkan generasi intelektual Islamis yang berwawasan dan memberikan arah perjuangan PMIPTI dalam rangka pelaksanaan kegiatannya dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari satu faktor penggerak pengembangan masyarakat Patani. Tujuan program umum PMIPTI disusun, yaitu untuk 1) Menjadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan PMIPTI secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. 2) Meningkatkan mekanisme organisasi PMIPTI untuk mengembangkan misi ganda, yaitu misi kemahasiswaan dan misi kemasyarakatan serta untuk menjadikan dasar bagi peningkatan organisasi PMIPTI pada periode-periode berikutnya.

Program umum PMIPTI berciri atau bersifat ekonomis, politis, sosial, budaya (EPOLISOSBUD), strategis dan konsepsional. Sifat program umum PMIPTI adalah 1) Memiliki dimensi atau ruang lingkup permasalahan pembangunan bangsa, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Merupakan jabatan AD/ART atas cita-cita didirikan PMIPTI. 3) Memiliki tahapan yang transparansi dalam mencapai tujuan pelaksanaan program. 4) Merupakan pelaksanaan dan pengembangan misi yang tercantum dalam AD/ART PMIPTI. Fungsi program umum PMIPTI, yaitu 1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara terpadu dan berkesinambungan. 2) Sebagai sarana menggalang persatuan, kesatuan, kebersamaan dan ukhuah islamiyah di negara Indonesia dan yang berada di negara lainnya.

Program umum PMIPTI berasaskan Islam dan keimanan yang berdasarkan AD/ART PMIPTI. Arah dan kebijakan program umum PMIPTI, yaitu 1) Program umum PMIPTI mengupayakan anggota PMIPTI memiliki potensi efektif yang bertanggung jawab, cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa, demokratis dan memiliki keterampilan serta pandangan yang rasional sesuai dengan intelektualitas. 2) Program umum PMIPTI sebagai program konstruksif

dan pengembangan anggota PMIPTI dalam upaya mempersiapkan anggota PMIPTI untuk mengembangkan diri dan organisasi dalam menghadapi dunia global dan khususnya masyarakat Patani.

Garis-garis Besar Program Umum PMIPTI Wilayah Sumatera Barat:

1. Program Pembinaan Organisasi

- a. Menetapkan, meningkatkan fungsi dan peranan PMIPTI sebagai wadah pembinaan anggota PMIPTI untuk melaksanakan misi kemahasiswaan dan kemasyarakatan melalui program yang terarah.
- b. Menetapkan dan meningkatkan konsolidasi organisasi dalam rangka perjuangan dinamika organisasi yang meliputi: konsolidasi ideal yang konseptual, konsolidasi personal, konsolidasi operasional, konsolidasi struktural dan fungsional.

2. Program Pembinaan Kader

- a. Kemampuan dalam kepemimpinan dan keorganisasian.
- b. Kemampuan daya kreatif dan berinisiatif.
- c. Idealisme, patriotism dan disiplin.
- d. Kepribadian yang luhur dan berakhlakulkarimah.
- e. Tertanam/ menjiwai ruhul tauhid dan ruhul ijtihad.

3. Program Komunikasi

- a. Meningkatkan komunikasi horizontal. Maksudnya hubungan antara sesama anggota PMIPTI dalam rangka mempererat solidaritas dan kesatuan umat demi mewujudkan Ukhuwah Islamiah.
- b. Meningkatkan komunikasi vertikal, yaitu hubungan anggota PMIPTI dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kemahasiswaan dalam rangka menyambung ideal untuk meningkatkan kualitas visi dan misi PMIPTI.
- c. Memperluas hubungan PMIPTI dengan organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik lain yang mendukung pelaksanaan dan cita-cita umat Patani.

4. Program Partisipasi

- a. Meningkatkan kesadaran bagi anggota PMIPTI sebagai wadah Ukhuwah Islamiah (anggota PMIPTI bertanggungjawab atas umat Islam Patani).
- b. Meningkatkan partisipasi, kompetensi dan peran anggota PMIPTI dalam mengatasi masalah kehidupan sosial ekonomi, sosial kultural, sosial politik dan pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat Patani.
- c. Meningkatkan dan memperluas duta-duta bangsa yang dapat menjelaskan cita-cita, eksistensi dan problematika yang dihadapi oleh masyarakat Patani dewasa ini kepada dunia luar terutama tokoh-tokoh masyarakat dan aparat-aparat pemerintah di Negara Indonesia (Staf Pengurus PMIPTI, 2017-2018:15-17).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Organisasi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat:

1. Pada tahun 2016 Organisasi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat mengadakan kegiatan yang diberi nama “Bicara PMIPTI”. Pada kegiatan ini PMIPTI Wilayah Sumatera Barat memberi tahu kepada masyarakat Indonesia bahwa Organisasi PMIPTI merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dari Patani dengan tujuan untuk mempersiapkan pemuda, memproduksi kader-kader sebagai pejuang pemikir yang mampu dan sanggup membela nasib bangsa Melayu Patani.
2. Tahun 2017 PMIPTI Wilayah Sumatera Barat mengadakan kegiatan “Majelis Seminar Mengenang Peristiwa Tragedi Pembantaian Massa Tak Bai”. Kegiatan ini bertujuan memberitahu kepada masyarakat Indonesia bahwa di kondisi Patani sedang tidak baik-baik saja.
3. Bandung, 21-23 Agustus 2017 PMIPTI Wilayah Sumatera Barat mengikuti kegiatan MKPPI (Majelis Kerjasama Persatuan Pelajar Patani (Selatan Thailand) di Indonesia). Acara MKPPI ini dihadiri oleh organisasi-organisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjaga, memelihara dan memperkuat Ukhuwah Islamiah dalam mewujudkan

kesatuan pelajar Patani serta aktif dalam memecahkan problem-problem yang terjadi di Patani.

4. Tahun 2018 PMIPTI Wilayah Sumatera Barat mengadakan kegiatan memperingati gelap 14 tahun tragedi berdarah Tak Bai Massacre 25.10.2004. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati dan memberitahukan kepada generasi penerus Patani dan masyarakat Indonesia dengan mengundang berbagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) terhadap sejarah terjadinya tragedi Tak Bai di Patani.
5. Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 20 Agustus PMIPTI Wilayah Sumatera Barat mengikuti kegiatan MKPPI Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat Indonesia terhadap realita kehidupan masyarakat Patani serta membahas mengenai HAM, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan bagaimana peran mahasiswa terhadap pendidikan, *networking* serta peran wanita terhadap masyarakat.
6. Pada tahun 2020 krisis bangsa Patani dibicarakan dalam forum PBB. Hasan Yamadibu menyampaikan isu nasib warga minoriti Patani, serta menceritakan asimilasi kerajaan Thailand yang memaksa bahasa Jawi Melayu diganti dengan bahasa Thai.
7. Tahun 2021 PMIPTI Wilayah Sumatera Barat menggelar seminar internasional di UIN Imam Bonjol Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran umum asal usul negara Patani dan menceritakan konflik yang terjadi di Patani.
8. Tahun 2022 PMIPTI Wilayah Sumatera Barat diundang oleh mahasiswa jurusan tadaris sejarah UIN Imam Bonjol Padang untuk menyampaikan keberadaan konflik di Patani. Acara ini dihadiri oleh 40 orang mahasiswa serta dosen ahli sejarah, Prof. Dr. H. Saifullah, SA., MA. Pada kegiatan ini PMIPTI Wilayah Sumatera Barat menceritakan asal usul sejarah Patani dan kondisi konflik yang terjadi di Patani.

Kontribusi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terhadap penyelesaian konflik di Patani Selatan Thailand, yaitu dengan cara membuka ruang politik atau bersuara

bebas dengan mengadakan aktivitas-aktivitas secara berkumpul bersama delegasi ataupun mengundang masyarakat khususnya Indonesia untuk menyampaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand (Japakiya, wawancara, 16 Mei 2022).

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi yang dilakukan PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terhadap penyelesaian konflik di Patani, yaitu dengan cara membuka ruang politik atau bersuara bebas dengan mengadakan aktivitas-aktivitas secara berkumpul bersama delegasi ataupun mengundang masyarakat khususnya Indonesia untuk menyampaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta proses analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya konflik di Patani, yaitu berawa dari perebutan wilayah dan kekuasaan antara Inggris dan Thailand yang bersaing untuk menguasai Semenanjung Melayu. Pada akhirnya Kerajaan Siam Thailand yang dapat menaklukkan Kerajaan Melayu Patani. Sejak Melayu Patani berada di bawah naungan Kerajaan Siam Thailand, rakyat Patani mengalami banyak diskriminasi di antaranya munculnya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Kerajaan Thailand terhadap warga Patani yang mengancam identitas masyarakat Patani itu sendiri. Wilayah, bahasa dan budaya mereka telah diubah secara sepihak oleh Kerajaan Thailand. Wilayah Patani dibagi menjadi tujuh bagian, bahasa Melayu yang biasa mereka gunakan diganti dengan bahasa nasional Thailand dan budaya yang berlaku di Patani yang sangat kental dengan budaya Melayu juga harus diganti mengikuti budaya Thailand.
2. Kontribusi yang dilakukan PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terhadap penyelesaian konflik di Patani, yaitu dengan cara memberitahukan kepada dunia luar terutama tokoh-tokoh masyarakat dan aparat-aparat pemerintah di

Negara Indonesia terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat Patani dewasa ini dengan melakukan berbagai kegiatan serta membuka ruang politik untuk menyampaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART PMIPTI 2018-2019 yang disepakati dan dicetak di Padang.
- Alexandra, F. 2017. *Analisis Pecahnya OMIP (Orang Melayu Islam Patani) dan Dampaknya Terhadap Konflik Thailand Selatan*. Jurnal Hubungan Internasional, Vol 5 No. 3.
- Anggito, A & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Sukabumi, Jawa Barat.
- Hayiteh, N. 2021. *Strategi Pendidikan Islam dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Persatuan Mahasiswa Islam Patani Selatan Thailand di Indonesia Yogyakarta (PMIPTI)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Helaluddin & Wijaya, H. 2019. *Analisi Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar.
- Hifza & Aslan. 2019. *Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand*. Al-Ulum, Vol. 19 No. 2.
- Japakiya, R. 2022. (Pengurus PMIPTI Padang), Wawancara langsung pada tanggal 16 Mei 2022, pada pukul 20:11 WIB di Asrama Kampus IAIN Batusangkar.
- Mamah, H. 2018. *Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Menangani Konflik Bersenjata di Patani*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher. Sidoarjo.
- Nofra, Doni & Kharisma. 2020. *Persatuan Mahasiswa Islam Patani Thailand Indonesia (PMIPTI) Kota Padang dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Melayu*. Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam.
- Sulong, K & Machali. 2016. *Dampak Konflik dan Resolusi Konflik Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani Thailand Selatan*. Jurnal Ulul Albab, Vol. 17 No. 2.
- Sumarwan. 2014. *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. IPB Press. Bogor.
- Wayeekao, N. 2016. *Berislam dan Benegara bagi Muslim Patani : Perspektif Politik Profetik*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 5 No. 2.
- Wulandari, C. 2018. *Sekuritasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan dalam Persektif Konstruktivisme*. Jurnal of International Relations, Vol. 4 No.1.